

**KEPASTIAN HUKUM STATUS NAHKODA ASING DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NAHKODA ASING DI KAPAL
BERBENDERA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PELAYARAN JO UNDANG-UNDANG PERIKANAN**

I Putu Aditya Arya Nugraha

(1387047)

ABSTRAK

Negara Hukum berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas hukum yang adil dan baik. Kekuasaan negara harus dilandaskan pada kekuasaan hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Beberapa alasan utama alasan negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Ekonomi merupakan satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa dikarenakan Negara Indonesia membutuhkan tenaga kerja asing baik dalam sektor perkantoran maupun perindustrian.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif yang difokuskan pada nahkoda asing dalam bidang kelautan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum Kelautan khususnya nahkoda asing. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang mengacu kepada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan bahan hukum sekundernya berupa buku-buku kelautan, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum kelautan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap nahkoda asing sejauh ini masih cukup baik namun perlu diperkuat mengenai Pasal 136 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa harus terdapat ekstradisi terhadap nahkoda. Melihat dari pada kerancuan peraturan yang berlaku di Indonesia cukup membuat status nahkoda sempat dipertanyakan. Tetapi mengingat bahwa nahkoda merupakan *lex specialis derogat generalis* maka nahkoda merupakan bidang yang spesial dalam menjalankan profesinya.

Kata Kunci : Nahkoda Asing, Kelautan, Pemanfaatan Kelautan, Imigrasi

**LEGAL CERTAINLY STATUS FOREIGN CAPTAIN AND LEGAL
PROTECTION FOR FOREIGN CAPTAIN ON BOARD INDONESIA
BASED ON SHIPPING JO BASED ON FISHERIES**

I Putu Aditya Arya Nugraha

(1387047)

ABSTRACT

The state law based on on the belief that the powers of the state must be executed over law and justice and good. The chair of the state must from sending such on the basis of law .The act of any state law serve as a platform .Some the main reason for the view of its organizing and carrying out their duties under the law. Economy is one of the social science that studies of human activities that deals with the production , the distribution of , and consumption on goods and services. The use of foreign labour in indonesia has become a commonplace because Indonesia country in need of workers both in foreign office sector and industry.

Methods in this research using the kind of research descriptive are focusing on foreign captain in the maritime affairs to assess the application of kaidah-kaidah or norma-norma law in maritime law especially foreign captain. Approach that is used is the approach that build on the primary law material like act number 17 of 2008 on shipping , and materials the maritime secondary law , experts opinion , and jurnal-jurnal maritime law.

The results of the study came to the conclusion that the protection of the law against foreign captain there is no problem with a satisfactory condition but need to be addressed to make a statement on article 136 on a voyage of that there should be a extradition request against against our captain. See from the previous year and the immense confusion in the applicable regulation in indonesia is still significantly make this status was hit by the train our captain of the events in question. But considering that our captain is *lex specialis derogat generalis* so our captain is an area that special in run profession.

Key Word : Foreign Captain, Maritime , The Utilization Of Maritime , Immigration.

DAFTAR ISI

Lembar Judul	
Pernyataan Keaslian	i
Lembar Pengesahan	ii
Persetujuan Panitia Sidang	iii
Persetujuan Mengikuti Sidang	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI IZIN BEKERJA NAHKODA	22
A. Hak dan Kewajiban Nahkoda.....	22
B. Syarat-Syarat dan Prosedur Pengangkatan Nahkoda.....	33
C. Izin Bekerja Nahkoda.....	35

BAB III EKSISTENSI PELAYARAN DAN PERKEMBANGAN KEGIATAN	
PERIKANAN DI INDONESIA	38
A. Definisi Pelayaran dan Implikasinya dalam Kelautan Indonesia.....	38
B. Hak Berdaulat Negara Atas Wilayah Laut Berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).....	44
C. Sistem Pelayaran di Indonesia.....	47
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN	
HUKUM HAK BEKERJA NAHKODA ASING DI INDONESIA.....	51
A. Kepastian Hukum Hak Bekerja Nahkoda Asing di Indonesia.....	51
B. Perlindungan Hukum Bagi Nahkoda Asing yang Sudah Mendapatkan Izin di Negara Indonesia.....	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	xii